

# **PENERAPAN *CIVIL SOCIETY* DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DI ERA GLOBALISASI**

Sigit Wahyudi<sup>1</sup>, Meydiana Rosyidah<sup>2</sup>

Dosen STISOSPOL Waskita Dharma Malang Program Studi Administrasi Publik<sup>1</sup>

Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang<sup>2</sup>

*sigitwahyudi@waskitadharma.ac.id*

Humanitarian issues are important in international relations in the era of globalization. Peace efforts in the modern era are different from peace efforts in the era of world war. Especially the development of digitalization has helped to provide wider spaces for civil society to be involved and influence the peace process in various life activities. Their habits are in the virtual world of the internet. The internet as a no-man's land does not have the sovereignty that governs it. This paper seeks to explain the involvement of Civil Society through the use of social networking platforms and the internet as part of efforts to foster peace in the humanitarian issue of human rights violations. This paper argues that netizens intervention is realized through online activism activities by utilizing virtual internet networks. Through the online activism movement, netizens try to act as peace actors by influencing the opinions of the general public and even the state in cyberspace.

*Keywords: civil society, peace, globalization, humanity, human rights*

## **ABSTRAK**

Permasalahan kemanusiaan menjadi penting dalam hubungan internasional di era globalisasi. Upaya perdamaian di era modern berbeda dengan upaya perdamaian di era perang dunia. Terutama berkembangnya digitalisasi yang telah membantu memberikan ruang-ruang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk terlibat dan mempengaruhi proses perdamaian di berbagai aktivitas kehidupan. Kebiasaan mereka berada pada dunia virtual internet. Internet sebagai sebuah lahan tak bertuan tidak memiliki kedaulatan yang mengaturnya. Paper ini berusaha untuk menjelaskan keterlibatan Civil Society melalui pemanfaatan platform jejaring sosial dan internet sebagai bagian dari upaya bina damai dalam permasalahan kemanusiaan pelanggaran HAM. Paper ini beragumen bahwa intervensi netizen diwujudkan melalui kegiatan aktivisme online dengan memanfaatkan jejaring virtual internet. Melalui gerakan aktivisme online, netizen berusaha berperan sebagai aktor perdamaian dengan mempengaruhi pendapat masyarakat umum bahkan negara di ruang publik maya.

**Kata kunci:** *Civil Society*, Perdamaian, Globalisasi, Kemanusiaan, HAM.

---

### **Pendahuluan**

Permasalahan kemanusiaan menjadi penting dalam hubungan

internasional di era globalisasi. UNDP menjelaskan pengertian human security adalah menyelamatkan manusia dari

ancaman serius dari kelaparan, penyakit, dan segala tindakan kekerasan serta represi untuk menjamin hak hidup. Gagasan human security dijelaskan dalam laporan UNDP mengenai Human Development Report of the United Nations Development Program pada tahun 1994. Namun gagasan human security mulai menjadi perdebatan setelah perang dingin berakhir. Amnesty Internasional melaporkan bahwa kasus pelanggaran HAM di Asia Pasifik sangat memprihatinkan. Kasus pengusuran, penyiksaan dan penahanan menjadi sorotan dalam kasus HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina, negara-negara Afrika, dan negaranegara dunia lainnya juga massif terjadi (Amnesty International:2014). Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan persoalan kemanusiaan terkonstruksi menjadi suatu hal yang genting sehingga diperlukannya tindakan konkrit dalam memperjuangkan human security. Hal ini memicu peran aktif seluruh aktor dalam hubungan internasional dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara membutuhkan penyelesaian tidak hanya pada level negara. Oleh karena itu penting melibatkan aktor non-negara dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Perdamaian dunia akan terwujud jika semua elemen bekerja secara kooperatif dalam menciptakannya. Kerja secara kooperatif dapat diwujudkan melalui keterbukaan arus informasi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi internet semakin memudahkan manusia untuk saling terhubung. Kecanggihan teknologi berdampak pada cara berkomunikasi yang semakin terdigitalisasi. Digitalisasi dalam proses komunikasi juga semakin dipermudah dengan penggunaan gadget (*smartphone*). Internet merupakan penemuan mutakhir dalam sejarah peradaban manusia.

Fungsi komunikasi dan informasi yang terdapat dalam internet memiliki dampak sosial yang luas (Castells:2014). Salah satunya adalah pemanfaatannya sebagai alat komunikasi massal. Manusia yang memaksimalkan fungsi internet disebut sebagai netizen (internet citizen) atau masyarakat internet. Munculnya netizen di abad modern adalah bentuk sosial cleavages baru. (Price:2013; Goode:2010). Internet sebagai sebuah lahan tak bertuan tidak memiliki kedaulatan yang mengaturnya. Paper ini beragumen bahwa intervensi netizen diwujudkan melalui kegiatan aktivisme online dengan memanfaatkan jejaring virtual internet.

## **Tinjauan Umum**

### **1. Civil Society**

Menurut Hegel, seperti yang disadur Dawam Rahardjo, *Civil Society* adalah perkumpulan merdeka orang-orang yang membentuk pada yang disebutnya *ber-gerliche gesellschaft* atau masyarakat borjuis (*bourgeois society*). Jika Locke, Rousseau dan Adam Smith, cenderung mengidealisasikan civil society sebagai hasil perkembangan masyarakat yang lebih maju yang memancarkan kekuatan dari dalamnya, berupa rasionalitas yang akan mampu menuntun masyarakat ke arah kebaikan umum.

Formula akhir dari cara pandang Hegel mengenai konsep civil society yaitu menempatkan negara sebagai medium pemenuhan segala nilai kebaikan. Hegel menyatakan mengenai pentingnya intervensi negara ke dalam civil society karena dua pertimbangan; pertama, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidak-sederajatan dalam masyarakat sehingga perlu diatasi oleh negara yang memiliki otoritas mengatur masyarakat. Kedua, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan.

Marx dan Hegel berpendapat bahwa negara adalah bagian dari superstruktur, mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan. Bagi Marx negara dianggap sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat sipil dan menyamakan masyarakat dengan masyarakat borjuis. Bagi Marx masyarakat borjuis mencerminkan sistem kepemilikan modern yang bermuatan nilai materialisme yang kasar, setiap orang mementingkan diri sendiri dan setiap orang melawan yang lain, sebab dalam masyarakat borjuis kedudukan individu menjadi yang utama. Marx telah memberikan teori tradisional tentang dua kelompok di dalam negara yang dikenal dengan base superstructure.

Berdasarkan perspektif ini, masyarakat terdiri dari dua unsur esensial yaitu dasar (base) dan superstruktur (superstructure). Adanya dua kelas ini mau tidak mau akan mengarah kepada konflik yang tidak dapat dihindarkan ketika keduanya berusaha mendominasi keduanya. Perbedaan yang tampak dengan pemikiran Hegel berangkat dari paradigma idealistik, dalam perspektif Marxian, posisi masyarakat sipil dipandang terletak pada basis material, atau biasa disebutnya *matériel of needs and necessity* dari hubungan produk kapitalis, kata Marx, civil society hanya merupakan fase transisi yang masih mengandung serangkaian kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis, yang pada akhirnya akan hancur dari dalam. Menurut Marx keberadaan borjuis tersebut merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu ia harus melepaskan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Konsep civil society mendapat pandangan yang positif sesungguhnya baru muncul sekitar abad ke 20 dari

sejumlah tokoh antara lain Antonio Gramsci, John Keane. Gramsci menganalisis civil society dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik determinasi ekonomi Marx. Gramsci melihat civil society tidak dalam dominasi ekonomi, namun dalam dominasi politik dan kultural. Kesimpulannya, konsep kunci Gramsci adalah hegemoni. Gramsci berpendapat, untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial yang dominan, mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat semacam kompromi dengan kelompok sosial lainnya didalam arena civil society. Oleh karena itu, civil society dipandang sebagai arena hegemoni, maka tujuan utama untuk melakukan penguatan civil society adalah sebagai instrumen guna melakukan counter terhadap negara. Sementara John Keane, seorang ahli ilmu sosial masa kini, terangterang menolak determinasi ekonomi ala Marx. Bagi Keane, civil society adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela dan keragaman pemerintah. Keane yang beraliran liberal, menyatakan bahwa berbagai macam bentuk kekuasaan dalam civil society tidak bersumber satu hal seperti penguasaan sarana produksi, tetapi dari berbagai faktor yang beragam dan heterogen. Memang Hegemoni diartikan sebagai suatu tatanan ide dan moral yang bisa menarik kesepakatan aktif dari kelas-kelas sosial yang didominasinya: Indriawan SW. Wibowo "Peran Militer dalam Civil Society, Suara Merdeka, Edisi 8 April 2020. Kendati demikian, negara juga memiliki fungsi etis, misalnya dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangannya, negara bisa memiliki berbagai unsur masyarakat sipil. Gramsci menuntut untuk terciptanya kemandirian masyarakat dan

negara lebih membatasi dalam melebarkan kekuasaannya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995:3). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

### **Pembahasan**

Studi perdamaian kemudian menjadi relevan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Declaration of Human Rights, misalnya, muncul sebagai teks perdamaian yang menjadi landasan disepakatinya nilai-nilai universal tentang kemanusiaan. Deklarasi ini memuat pasal yang menyatakan semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Beberapa perjanjian internasional tersebut menandai bahwa humanitarianisme dan perdamaian dalam hubungan internasional masih menjadi hal yang kerap diperdebatkan. (Richmond, 2008). Perdamaian dalam hubungan internasional dimaknai sebagai perdebatan nyata dan memerlukan jawaban nyata. Institusionalisasi perdamaian menyediakan aturan internasional dan jaminan melalui demokrasi dan pasar bebas, serta perdamaian sipil untuk memastikan kebebasan dan HAM dalam masyarakat. Pentingnya aktor non negara dalam mewujudkan perdamaian adalah sebagai watchdog sekaligus kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensi negara (Cohen dalam Hikam dalam Triwibiwo, 2006). Peran aktor non-negara dapat dimaksimalkan melalui adanya civil

society sebagai entitas dalam sistem sosial.

Peran Civil Society Konsep masyarakat sipil atau civil society merupakan konsep yang terus diperdebatkan definisinya. Konsep ini memenuhi perdebatan-perdebatan kontemporer mengenai ilmu ekonomi, politik, dan sosial. Menurut Collins English Dictionary, civil society merupakan elemen-elemen seperti kebebasan berbicara dan pengadilan independen yang menyusun sebuah masyarakat demokratis (Collins English Dictionary, 2015) atau dalam pernyataan Ernest Gellner, tanpa civil society, tidak ada demokrasi (Gellner, 1994). Sementara menurut WHO, civil society dilihat sebagai sebuah lapisan sosial yang terpisah dari negara dan pasar (WHO, 2015). BBC (2001) dalam liputan khususnya mengenai civil society, mendefinisikan konsep ini sebagai ruangan publik yang berada diantara negara, pasar,

Thomas Hobbes menitikberatkan pada kuatnya peran negara sebagai satu-satunya penjaga perdamaian serta pencegah kondisi *bellum omnium contra omnes* (semua lawan semua). Dilain pihak, John Locke menitikberatkan pada adanya kebebasan individu untuk kehidupan sosialnya dan secara tidak langsung akan menjamin keberlangsungan masyarakat sipil. Kebebasan individu yang didengungkan oleh John Locke menjadi populer saat ini karena peran negara yang minimal seperti dianjurkan oleh teori liberal menjadi dominan dan dianut oleh negara-negara modern (Pietrzyk. 2001). Alexis de Tocqueville (1863) menyebut civil society sebagai asosiasi sipil. De Tocqueville (1863) melihat civil society sebagai bentuk asosiasi politik dimana ia bergerak untuk mempromosikan hal-hal publik untuk menjadi perhatian bersama. Aktifnya masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan yang dihasilkan

pemerintah secara efektif dijalankan dalam bentuk organisasi-organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil yang memiliki struktur ini menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang terfragmentasi berdasarkan isu-isu publik (Imawan, 2013). Luasnya fragmentasi terhadap isu-isu yang berkembang ini berakibat pada tingginya jumlah organisasi masyarakat sipil. Heterogenitas ini menjadi kekuatan penyeimbang dari dominasi negara dan pasar serta menjadi kekuatan ketiga dalam struktur politik modern (Keane, 2003: 65). Selain jumlah yang sangat banyak kekuatan dari organisasi masyarakat sipil terdapat pada dua hal yaitu sebagai Agen advokasi terhadap masyarakat dikarenakan kemampuannya untuk menjangkau masyarakat terpencil dan sebagai pemotongan jalur yang dilalui pemerintah dalam penerapan kebijakan (Riker dalam Widjajanto, 2007: 38).

Meskipun demikian, munculnya organisasi masyarakat sipil sebagai aktor dalam sistem internasional tidak serta merta menggantikan dominasi negara (Tvedt, 2002). Akan tetapi lebih kepada mengisi jenjang yang tidak bisa di penuhi negara seperti yang disebutkan Riker. Namun hal ini pula lah yang kemudian sering dikritik sebagai keterbatasan gerakan dan organisasi masyarakat sipil. Internet dan Operasi Bina Damai Proses bina damai adalah proses yang rumit (Cubitt, 2013) mengingat luasnya ruang lingkup studi perdamaian. Data yang dirilis statista menunjukkan sekitar 1,79 milyar manusia di dunia menggunakan situs jejaring sosial pada periode 2010 hingga 2014 (Statista.com, 2015). Aktivisme Internet adalah bentuk aktivisme yang dilakukan di dunia maya. Aktivisme merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari gerakan sosial. Gerakan aktivisme adalah upaya tercapainya perubahan

sosial. Perubahan tersebut umumnya ditujukan kepada para pembuat kebijakan, atau sekedar untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat luas. Tim Jordan menjelaskan bahwa :

*Activism is essentially something done together by many people, but we must be careful with the sense of group or collective that is employed here. What is essential to activism is not simply being more than one, as we are in a cinema, but a sense of solidarity in pursuit of transgression. There has to be a sense of shared identity, which can best be understood at this stage as people recognizing in one another the anger, fear, hope or other emotions they feel about a transgression. (Jordan, 2002)*

Gerakan masyarakat sipil global bergerak berdasarkan aktivisme yang dibangun dalam skala global. Aktivisme yang berdasarkan masyarakat sipil tentu tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh negara. Hal ini dilakukan untuk mendorong kelompok masyarakat sipil di dalam negara tersebut untuk menyebarkan ide-ide perdamaian di internal negara (lihat Anheier, et al eds. 2007: 94).

Tongeren (2013) menyoroti adanya gerakan bottom up oleh masyarakat sipil yang membentuk kepanitiaan lokal yang terdiri dari para tetua adat untuk mewujudkan perdamaian dalam skala yang kecil pada daerah yang berkonflik. Di Kenya, Ushahidi merupakan situs yang mengembangkan monitoring terhadap kericuhan yang terjadi akibat pasca pemilihan umum 2007 (Okolloh, 2008). Ushahidi bergerak melalui adanya monitoring berbasis crowdsourcing. Ushahidi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kericuhan berdasarkan laporan sukarelawan yang terkirim pada server Ushahidi.

Peran aktif masyarakat sipil menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus HAM di dunia. Dengan munculnya internet, negara juga tidak mau kalah dalam melakukan penetrasinya ke dalam ranah dunia maya ini (De Nardis. 2012; Yang.2014). Pada akhirnya, teknologi memang bukan sebagai panacea akan tetapi penggunaan teknologi mampu memangkas jalur birokrasi tradisional. Sehingga informasi yang disajikan secara real time mampu dimanfaatkan setiap anggota masyarakat yang mengakses terhadap informasi tersebut.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Dari analisis diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang penerapan civil society dalam upaya membangun kedamaian kemanusiaan di era globalisasi:

1. Komitmen dalam upaya menciptakan dan mengembangkan civil society dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara di masa depan masih belum baik. Namun, upaya tersebut memerlukan kesadaran dan pemahaman segenap lapisan masyarakat, terhadap perdamaian dan kemanusiaan serta pengaruh dari adanya globalisasi yang selaras dengan konsep *civil society*.
2. Kondisi keyakinan yang masih kurang di tengah masyarakat tentang civil society (masyarakat madani) merupakan citra ideal sistem kemasyarakatan yang terbaik dalam suatu sistem sosial yang dicitakan. Seiring dengan itu kurangnya

rasa saling percaya di kalangan masyarakat sangat diperlukan.

3. Civil society adalah terbentuknya lembaga lembaga sosial atau organisasi-organisasi di luar negara, yang memiliki otonomi relatif dan memerankan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

### **Saran**

1. Perlu meningkatkan Komitmen dalam menciptakan dan mengembangkan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara program kemanusiaan yang melibatkan semua elemen masyarakat.
2. Perlu adanya pemikiran-pemikiran alternatif baru yang mempunyai kepedulian terhadap keyakinan yang masih kurang di tengah masyarakat tentang civil society yang ideal.
3. Pengaruh dari lembaga-lembag sosial sangat perlu untuk menjadi fungsi kontrol atau penengah untuk tetap menjaga perdamaian diatas kepentingan kemanusiaan. Dan kebebasan terhadap seluruh manusia juga tetap menjadi prioritas lembaga-lembaga sosial yang berfokus menjaga kestabilan perdamaian atas kemanusiaan diseluruh negara didunia.

---

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Anheier, H., Glasius, M. and Kaldor, M. (eds) (2001). Global civil society 2001. Oxford: Oxford University Press.
- Gellner, E. (1994). Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. London: Hamish Hamilton.

- Jordan . T., 2002, *Activism : Direct Action, Hactivism and the Future of Society*. London : Reaktion Books.
- Keane, J. (2003). *Global civil society?*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richmond, Oliver P. (2008) *Peace in International Relations*. New York: Routledge.
- Widjajanto, A. (2007). *Transnasionalisasi masyarakat sipil*. Depok: FISIP UI Press.
- Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial : Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta : LP3ES.

### **Jurnal**

- Cubitt, C. (2013) *Constructing civil society: an intervention for building peace*. *Peace building* 1:1, 91-108.
- DeNardis, L. (2012) *Hidden Levers Of Internet Control, Information, Communication & Society*, 15:5, 720-738, DOI: 10.1080/1369118X.2012. 659199.
- Goode, L. (2010) *Cultural Citizenship Online: The Internet and Digital Culture*. *Citizenship Studies* 14:5 527-542.
- Price, E. (2013) *Social Media and Democracy* *Australian Journal of Political Science*, 48:4,519-527.
- Thornton, A.L. (2001) *Does the internet create democracy?*, *Ecquid Novi: African Journalism Studies*, 22:2, 126-14.
- Tvedt, T. (2002) *Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System?* *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 13, No. 4, *Global Civil Society* (December 2002), pp. 363-375.
- Van Tongeren, P. (2013) *Potential Cornerstone of Infrastructures For Peace? How Local Peace Committees Can Make a Difference*, *Peace building*, 1:1, 39-60, DOI:10.1080/21647259.2013.756264.
- Yang, G. (2014) *The Return of Ideology and the Future of Chinese Internet Policy*, *Critical Studies in Media Communication*, 31:2, 109-113, DOI: 10.1080/15295036.2014.913803.

### **Artikel dalam Jaringan**

- Amnesty International. 2014. *Amnesy International Report 2014/2015. Asia Pasific Regional Overview* dalam <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/report-asiapacific/> diakses tanggal 11 April 2020
- BBC World Service (2001) *What is Civil Society?* dalam [http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/highlights/010705\\_civil.shtml](http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/highlights/010705_civil.shtml) diakses tanggal 12 April 2020.
- Castells, M. (2014) *The Impact of The Internet on Society: A Global Perspective* dalam <http://www.technologyreview.com/view/530566/the-impact-of-theinternet-on-society-a-globalperspective/> diakses tanggal 14 April 2020.
- Collins English Dictionary. (2015). *Civil Society* dalam <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/civil-society> diakses tanggal 11 April 2020.
- Okolloh,O. (2008). *Ushahidi, or ‘testimony’: Web 2.0 tools for crowdsourcing crisis information* dalam <http://pubs.iied.org/pdfs/G02842.pdf> diakses tanggal 14 April 2020.
- WHO. (2015). *Civil Society* dalam <http://www.who.int/trade/glossary/society006/en/> diakses tanggal 13 April 2020.







Civil Society (Autosaved).d

3 menit yang lalu

13%

Risiko dan plagiarisme

TINGGI

Parafrase

1%

Kutipan salah

0%

Konsentrasi

☆☆☆

Bagikan

Dalam

?

\$ 1.00

BARIS

Artikel ilmiah

?

\$ 2.50

Mengoreksi

>

Hapus plagiarisme

>

Design

>

Lihat laporan

\$ 2.68